MUNGKINKAH UNIVERSAL BASIC INCOME (UBI) DITERAPKAN DI INDONESIA?

Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Hidsal Jamil

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Sitasi yang disarankan

Jamil, H. (2021). Mungkinkah Universal Basic Income (UBI) Diterapkan di Indonesia? Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. JIE FEB UB, Malang.

Mungkinkah *Universal Basic Income (UBI)* Diterapkan Di Indonesia?

Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Hidsal Jamil

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Abstraksi

Dampak pandemi Covid-19 dan revolusi industri yang substansial telah mendorong diterapkannya *Universal Basic Income (UBI)* diterapkan secara permanen, bukan hanya di masa krisis. Studi ini telah menyediakan penilaian mengenai kemungkinan potensi penerapan UBI di Indonesia secara permanen. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis, studi ini tampaknya tidak menyediakan dukungan terhadap penerapan UBI secara permanen di luar masa krisis dan transisi pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini cukup beralasan mengingat penerapan BLT sebagai program yang paling mendekati UBI tidak sepenuhnya menunjukkan manfaat kesejahteraan dalam artian luas, bahkan di masa krisis sekalipun. BLT memang memberikan manfaat yang cukup besar terhadap aspek ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan, namun justru menimbulkan efek yang lebih kontraproduktif terhadap aspek kesehatan dan pengembangan komunitas.

Kata Kunci: *UBI, BLT, Covid-19.*

1. Pendahuluan

Sampai sejauh ini, Indonesia masih menjadikan pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama pembangunan ekonomi. Meskipun Indonesia telah sukses menekan kemiskinan ekstrem sampai dengan 3,6% pada tahun 2019, sayangnya masih terdapat populasi yang termasuk miskin secara moderat sebesar 17,9% dan rentan miskin sebesar 31,7. Dengan kata lain, hanya 46,8% populasi di Indonesia yang sepenuhnya terbebas dari kemiskinan pada tahun yang sama (World Bank, 2020).

Gambar 1: Struktur Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Pendapatan

Sumber: Diadaptasi dari World Bank (2020).

Sejalan dengan agenda peningkatan kesejahteraan, dorongan untuk menerapkan *Universal Basic Income*, selanjutnya disebut UBI, semakin masif dalam konteks Indonesia. Dorongan ini berangkat dari kondisi pembangunan ekonomi terkini seperti pandemi Covid-19 yang ditengarai dapat mengirim 19,7 juta populasi ke dalam “jurang” kemiskinan (Suryahadi *et al*, 2020), tepat pada konteks tersebut, UBI sendiri dianggap sebagai instrumen yang mampu memberikan pendapatan minimum yang mencegah setiap populasi berada di bawah standard hidup layak. Selain kondisi eksisting, penerapan UBI secara permanen pasca pandemi Covid-19 juga diharapkan dapat mencegah 23 juta populasi di Indonesia terpapar risiko kehilangan pekerjaan dikarenakan otomatisasi dan robotisasi pada tahun 2030 (Das *et al*, 2019).

Namun demikian, pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan UBI di Indonesia masih relatif terbatas. Studi ini akan menjawab apakah penerapan UBI pasca pandemi Covid-19 dimungkinkan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bagian selanjutnya dari studi ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai konsepsi UBI. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis pada studi terdahulu yang relevan, bagian berikutnya juga akan membahas pro dan kontra penerapan UBI berdasarkan pengalaman negara lain di dunia, baru kemudian dilanjutkan dengan tinjauan potensi dampak UB terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia. Studi ini kemudian akan ditutup dengan simpulan dan arah kebijakan ke depan.

2. Konsepsi Universal Basic Income (UBI)

Pada dasarnya, UBI merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan pendapatan tetap minimum kepada seluruh anggota masyarakat tanpa syarat yang spesifik (terlepas apapun latar belakang sosioekonomi penerima manfaat) dalam yurisdiksi tertentu. UBI juga muncul dalam bentuk lain yang serupa seperti *unconditional basic income*, *social dividend*, *citizen's income*, *demogrant*, dan *basic income guarantee* (Ghatak & Maniquet, 2019).

UBI sendiri mencakup tiga skema redistribusi (Gentilini *et al*, 2019). *Pertama*, UBI melalui transfer tunai yang tentunya berbeda bantuan dalam bentuk penyediaan barang seperti makanan, perumahan, dan bahan bakar minyak (BBM). *Kedua*, UBI berlaku secara universal, artinya tidak ditargetkan untuk kelompok tertentu. *Ketiga*, UBI merupakan bantuan tanpa syarat sehingga penerima manfaat tidak berkewajiban memberikan *feedback* tertentu kepada pemerintah. Ghatak & Maniquet (2019) menggarisbawahi, paling tidak, ada empat makna "tanpa syarat" dalam UBI: i) tidak terbatas apakah mereka bekerja atau tidak maupun pendapatan di luar pekerjaan utama; ii) tidak terbatas pada kriteria demografi tertentu seperti usia, jenis kelamin, status keluarga, dan sejenisnya; iii) tidak terbatas pada kebutuhan barang tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan sebagainya; serta iv) tidak terbatas pada kriteria layak atau tidaknya individu menerima bantuan, seperti bebas dari keharusan pemanfaatan layanan kesehatan dalam pertolongan ibu melahirkan, bebas dari catatan kriminal, dan lainnya. Sebagai gambaran, posisi UBI dalam kategorisasi bantuan sosial dapat diilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2: Kategorisasi Bantuan Sosial

Sumber: Gentilini *et al* (2019).

3. Pro dan Kontra Penerapan *Universal Basic Income* (UBI) Berbagai Negara di Dunia

Hanya ada dua negara yang pernah menerapkan UBI – sesuai dengan definisi yang disebutkan pada bagian sebelumnya– secara nasional adalah Mongolia dan Iran. Penerapan UBI di Mongolia mencakup sekitar 3 juta populasi dimana pada tahun 2010 penerima manfaat memperoleh setara 7 dollar AS setiap bulan dan selama rentang tahun 2011-2012 penerima manfaat memperoleh setara 17 dollar AS setiap bulan. Sedangkan, penerapan UBI di Iran menjangkau 97% dari total populasi dimana penerima manfaat memperoleh setara 40-45 dollar AS setiap bulannya atau sekitar 25% dari median pendapatan (Gentilini *et al*, 2019).

Selain pada level nasional, penerapan UBI dalam skala yang lebih kecil berupa *pilot project* juga telah banyak dilakukan. Setidaknya ada empat eksperimen sosial berkenaan dengan UBI yang pernah diterapkan di Amerika

Serikat; i) penerapan pajak negatif di New Jersey dan Pennsylvania selama tahun 1968-1972 mencakup 1.357 rumah tangga perkotaan; ii) eksperimen UBI di pedesaan di Iowa dan North Carolina selama tahun 1969-1973 mencakup 809 rumah tangga berpendapatan rendah; iii) eksperimen UBI di Gary, Indiana, selama tahun 1971-1974 mencakup 1.780 rumah tangga Afro-Amerika; dan iv) eksperimen UBI terbesar yang mencakup 4800 rumah tangga di Seattle dan Denver selama tahun 1971-1982. Selain di Amerika Serikat, *pilot project* berkenaan dengan UBI dalam berbagai macam bentuk intervensi program juga tersebar di negara berkembang seperti India, Kenya, Namibia, Kuwait dan di negara yang lebih maju seperti Finlandia, Kanada, Spanyol, Italia (Gentilini *et al*, 2019).

Terlepas dari itu semua, sejauh ini manfaat dari penerapan UBI masih menyisakan perdebatan yang cukup masif di kalangan peneliti dan perumus kebijakan. Pandangan yang optimis melihat UBI sebagai instrumen yang tepat untuk mereduksi kemiskinan sekaligus ketimpangan pendapatan melalui dua cara (Adiwena, 2020). **Pertama**, UBI dianggap mampu meningkatkan pangsa pendapatan yang diperoleh kelompok pendapatan terbawah. UBI menempatkan kelompok miskin menerima jumlah uang yang relatif lebih besar daripada kelompok kaya sehingga dapat mengurangi ketimpangan. **Kedua**, melalui sistem perpajakan yang ada, kelompok kaya menanggung tarif pajak yang lebih tinggi daripada kelompok miskin sehingga mempersempit kesenjangan antara keduanya. Sebaliknya, pandangan yang pesimis melihat UBI sebagai instrumen yang justru berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan, dikarenakan ada beberapa faktor lain yang sulit dikontrol. **Pertama**, dengan menggantikan program bantuan sosial yang ada dengan UBI, dapat menghasilkan manfaat bersih yang lebih kecil bagi kelompok miskin, bahkan pada taraf tertentu justru menimbulkan kerugian bersih. **Kedua**, jika suatu negara ingin memberlakukan pajak yang lebih regresif untuk membiayai UBI, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), skema tersebut dapat memperburuk ketimpangan pendapatan, bahkan jika PPN tidak menyertakan pengeluaran untuk makanan, perumahan dan kesehatan. Berbeda dengan sistem pajak progresif, skema regresif akan merugikan kelompok miskin secara proporsional daripada kelompok kaya.

Secara empiris, Gibson *et al.* (2018) telah merangkum dampak penerapan UBI terhadap kesejahteraan secara lebih luas seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pengembangan komunitas, dan luaran ekonomi lainnya.

<i>Outcome</i>	NJ NIT	Gary	RIME	SIME	Mincome	APDF	MPUCT	Casino Dividends	Iran Cash Transfer
Rumah Tangga dan Komunitas									
Tingkat Perceraian	↓	-	↓	0	-	-	-	0	-
Kualitas pengasuhan anak	-	-	-	-	-	-	-	↑	-
Tingkat kriminal penduduk remaja	-	-	-	-	-	-	-	↓	-
Tingkat kriminal penduduk dewasa	-	-	↓	↓	-	-	-	↓	-

Catatan:

↑= Meningkatkan; ↓=Menurun; 0 = Tidak Ada Dampak

NJ NIT= New Jersey Negative Income Tax; **Gary**= Gary Income Maintenance Experiment; **RIME**=Rural Income Maintenance Experiment;

SIME=Seattle/Denver Income Maintenance Experiment; **Mincome**=Manitoba Basic Annual Income Experiment; **APDF**=Alaska Permanent Dividend Fund;

MPUCT=Madhya Pradesh Unconditional Cash Transfer Pilot; **Casino Dividends**=Tribal Casino dividends.

Sumber: Diadaptasi dari Gibson *et al.* (2018).

Dalam **aspek ekonomi**, praktis hanya studi dengan setting APDF yang menilai dampak UBI terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gibson *et al*, 2018). Penerapan APDF membantu mengurangi tingkat kemiskinan di Alaska. Namun demikian, penerapan APDF pada saat yang sama justru memperburuk tiga jenis tingkat ketimpangan pendapatan yaitu *Gini Coefficient*, *Relative Mean Deviation*, dan *Entropy Theil Index*. Sejalan dengan argumen Adiwena (2020), ketimpangan pendapatan yang memburuk dikarenakan pengeluaran kelompok kaya lebih banyak bersifat produktif untuk meningkatkan pendapatannya dalam jangka menengah sedangkan pengeluaran kelompok miskin cenderung lebih banyak bersifat konsumtif seperti pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dsb. Hal ini diperburuk dengan sistem perpajakan yang regresif dimana kelompok kaya lebih diuntungkan daripada kelompok miskin (Gibson *et al*, 2018). Bahkan, studi eksperimental Daruich & Fernández (2020) mengklaim dalam konteks Amerika Serikat, UBI memang membantu dalam masa krisis ekonomi, tetapi penerapannya secara permanen akan menyebabkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, hampir semua setting eksperimen sosial menyertakan **aspek ketenagakerjaan** dengan *outcome* kebijakan yang lebih bervariasi (Gibson *et al*, 2018). Lima eksperimen sosial yang dilakukan di Amerika Serikat dan Kanada (NJ NIT, Gary, RIME, SIME, Mincome) hampir seluruhnya mengkonfirmasi bahwa UBI dapat menurunkan jam kerja laki-laki dan perempuan. Temuan yang menggembirakan juga tercermin pada indikator lain seperti pekerja anak dan kepemilikan UMKM. Sebaliknya, dalam hal tingkat partisipasi di pasar kerja, tampaknya seluruh studi mengkonfirmasi tidak ada pengaruh terhadap tingkat partisipasi laki-laki, sedangkan studi yang menilai dampak terhadap tingkat partisipasi perempuan menuai hasil yang lebih bervariasi. Bahkan, dalam kasus Casino Dividend, UBI justru kotraproduktif terhadap pengembangan aktivitas ekonomi pada usaha produktif.

Berikutnya, hampir seluruh setting eksperimen sosial kecuali APDF dan Iran Cash Transfer yang menyertakan **aspek pendidikan** pada evaluasi programnya (Gibson *et al*, 2018). Seluruh studi menemukan bahwa penerapan UBI dapat meningkatkan tingkat partisipasi sekolah. Sedangkan, hasil yang lebih bervariasi terjadi pada kinerja pendidikan (nilai rerata ujian) dan tingkat kehadiran siswa. Program Gary dan RIME relatif mampu meningkatkan kinerja pendidikan sedangkan program SIME tidak memiliki dampak terhadap kinerja pendidikan.

Dalam hal tingkat kehadiran siswa, hanya program RIME yang mendeteksi adanya kenaikan tingkat kehadiran siswa, sementara dua program lainnya yaitu Gary dan SIME justru tidak menemukan dampak tersebut.

Dalam **aspek kesehatan**, hanya Iran Cash Transfer yang tidak menyertakan indikator kesehatan dalam evaluasi programnya (Gibson *et al*, 2018). Sejauh ini, seluruh program menemukan bahwa penerapa UBI dapat meningkatkan kecukupan nutrisi dengan dukungan studi yang relatif kuat. Meskipun ada indikasi UBI meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, namun klaim tersebut hanya didukung satu studi pada Casino Dividends. Sedangkan dampak UBI terhadap indikator kesehatan lain seperti berat badan bayi lahir rendah, kesehatan mental, penggunaan fasilitas kesehatan, dan penyalahgunaan NAPZA, relatif beragam sehingga sulit untuk ditarik kesimpulan.

Terakhir, dalam hal **aspek rumah tangga dan pengembangan komunitas**, hanya empat program (yaitu NJ NIT, RIME, SIME, dan Casino Dividends) yang menyertakannya dalam penilaian. Seluruh studi menemukan bahwa penerapan UBI memperbaiki kinerja pengasuhan anak dan tingkat kriminal baik di kalangan remaja maupun di kalangan dewasa. Sebaliknya, dampak UBI terhadap tingkat perceraian masih belum dapat disimpulkan.

Terlepas dari pengalaman berbagai negara, ada beberapa catatan yang perlu ditekankan jika hendak menggunakan hasil studi penerapan UBI dari negara lain sebagai dasar pertimbangan penerapan UBI secara permanen di Indonesia. Hampir seluruh studi didominasi oleh *Randomization Controlled Trial* (RCT) yang notabene, menurut Deaton (2020), memiliki kelemahan dalam validitas eksternal. Artinya, temuan di berbagai negara tersebut belum tentu menghasilkan outcome kebijakan pembangunan yang sama persis, bahkan bisa saja kontraproduktif apabila diterapkan di Indonesia. Untuk itu, bagian selanjutnya akan mengulas dampak UBI berdasarkan studi yang pernah dilakukan dalam konteks Indonesia.

4. Meninjau Dampak *Universal Basic Income* (UBI) terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Indonesia

Penerapan UBI secara utuh sesuai dengan prinsip *universality*, *unconditional*, dan *cash transfer* masih belum pernah dilakukan di Indonesia. Salah satu program yang paling mendekati ialah Bantuan Langsung Tunai, selanjutnya disebut BLT. BLT sendiri memang memenuhi kriteria tanpa syarat atau dengan kata lain nilai manfaat tidak didasarkan pada besaran pendapatan

eksisting penerima sekaligus memenuhi kriteria pemberian bantuan secara tunai, namun BLT masih belum mampu mencakup populasi secara universal (Gibson, *et al*, 2018).

Terlepas dari itu, BLT sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 untuk mencegah daya beli rumah tangga miskin memburuk dikarenakan penerapan reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk merespon harga minyak dunia yang tinggi. BLT menysasar rumah tangga miskin dan hampir miskin yang terdiri dari 30% populasi dengan basis verifikasi menggunakan data Badan Pusat Statistika (BPS). Bazzi *et al* (2012) menyebutkan BLT dibayarkan setiap tiga bulan dengan nilai sebesar Rp. 300.000,- atau setara dengan 15% dari pengeluaran rumah tangga penerima manfaat selama setahun. Dengan alasan yang sama seperti pada tahun 2005, BLT kembali diterapkan pada tahun 2008 melalui pemberian uang tunai sebesar Rp. 100.000,- per bulan selama 9 bulan (World Bank, 2012). Pada pertengahan 2013, pemerintah menerapkan program serupa BLT yang disebut sebagai Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) untuk membantu 15,5 juta rumah tangga miskin dan rentan berupa pemberian uang tunai senilai Rp. 150.000,- per bulan selama 4 bulan (Hastuti *et al*, 2013). Terakhir, BLT kembali diterapkan pada tahun 2020 untuk merespons dampak ekonomi pandemi Covid-19 masing-masing 600 ribu per bulan pada selama April-Juni 2020 dan 300 ribu per bulan selama Juli-September 2020 (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Dampak penerapan BLT terhadap **aspek ekonomi** dapat ditemukan dalam studi Bazzi *et al* (2012), Hossain *et al* (2012), dan World Bank (2012). Studi Bazzi *et al* (2012) yang menggunakan metode *Difference-in-Difference* (DiD) menemukan bukti bahwa BLT mampu berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Sedangkan, studi kualitatif Hossain *et al* (2012) yang menyertakan 1,500 informan pada 33 daerah menemukan bahwa BLT memungkinkan rumah tangga penerima manfaat berinvestasi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal yang menarik pemberian BLT berdasarkan studi World Bank (2012) bahkan memicu *spillover effect* dimana ada kecenderungan peningkatan pengeluaran pada rumah rumah tangga yang tidak menerima BLT.

Selanjutnya, terdapat dua studi yang menilai **aspek ketenagakerjaan** sebagai outcome kebijakan. Studi Bazzi *et al* (2012) melaporkan bahwa penerima BLT memiliki partisipasi dalam pasar kerja yang lebih tinggi dibandingkan mereka

yang tidak tergolong penerima BLT. Bahkan, dalam hal jam kerja, penerima BLT relatif mampu mempertahankan jam kerja yang produktif. Sedangkan studi World Bank (2012) menemukan hasil yang cukup menggembirakan dimana BLT mampu mengurangi pekerja anak secara substansial sampai dengan 2,5% dibandingkan baseline.

Dalam **aspek pendidikan**, studi World Bank (2012) dan Hossain *et al* (2012) yang melaporkan outcome kebijakan pada aspek tersebut. World Bank (2012) mencatat BLT telah mampu meningkatkan partisipasi sekolah masing-masing 1,2% dan 2,5% pada usia 6-18 tahun dan usia 12-18 tahun, meskipun secara statistik tidak begitu substansial. Studi ini World Bank (2012) juga senada dengan studi Hossain *et al* (2012) yang menemukan bahwa dengan adanya BLT, rumah tangga miskin dan rentan dapat mengalokasikan pengeluarannya untuk pendidikan.

Selanjutnya, dampak BLT terhadap outcome kebijakan pada **aspek kesehatan** relatif kurang menggembirakan. Hanya studi World Bank (2012) yang menemukan bahwa ada kecenderungan peningkatan penggunaan fasilitas layanan kesehatan. Sayangnya, studi Triyana (2016) menemukan bahwa BLT cenderung meningkatkan biaya kesehatan dikarenakan permintaan akan layanan kesehatan lebih besar daripada penawarannya. Senada dengan hal tersebut, Hossain *et al* (2012) menyebutkan bahwa penerapan BLT justru cenderung meningkatkan pengeluaran untuk konsumsi alkohol. Studi paling baru juga menemukan bahwa penerapan BLT tidak secara substansial meningkatkan kepemilikan jaminan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (Al Izzati *et al*, 2020). Padahal, dua komponen ini sangat penting dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Terakhir, ada tiga studi yang menilai dampak BLT terhadap **aspek pengembangan komunitas** dengan hasil yang kurang memuaskan. Studi Al Izzati *et al* (2020) menggunakan data longitudinal yang relatif panjang melaporkan bahwa BLT sama sekali tidak menstimulasi rumah tangga penerima untuk terlibat dalam kegiatan arisan. Temuan lebih ekstrem seperti dalam studi Beaton & Lonton (2010) dan Hossain *et al* (2012) menemukan bahwa penerapan BLT telah menciptakan konflik sosial. Hal ini cukup beralasan mengingat sekitar 37% penerima BLT tidak termasuk ke dalam rumah tangga miskin. Selain itu, penentuan calon penerima BLT oleh kepala desa seringkali tidak didasarkan pada aturan yang berlaku bahkan pendistribusiannya cenderung semi formal.

Tabel 2: Ringkasan Dampak BLT terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

<i>Outcome</i>	Dampak BLT
Ekonomi	
Kemiskinan	↓
Kemampuan investasi	↑
Ketenagakerjaan	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	↑
Pekerja Anak	↓
Pendidikan	
Tingkat Partisipasi Sekolah	↑
Pengeluaran untuk Pendidikan	↑
Kesehatan	
Penggunaan fasilitas kesehatan	↑
Biaya Kesehatan	↑
Penyalahgunaan NAPZA	↑
Kepemilikan Jaminan Kesehatan	o
Pola Hidup Bersih dan Sehat	o
Rumah Tangga dan Pengembangan Komunitas	
Konflik Sosial	↑
Modal Sosial/Partisipasi dalam Arisan	o
Spillover Effect	
Pengeluaran rumah tangga non-penerima	↑

Catatan:

↑= Meningkatkan; ↓=Menurun; o = Tidak Ada Dampak

Sumber: Diadaptasi dari Al Izzati *et al* (2020); Gentillini *et al* (2019); Triyana (2016); Bazzi *et al* (2012); World Bank (2012), Hossain *et al* (2012); Beaton & Lonton (2010).

5. Simpulan dan Arah Kebijakan ke Depan

Studi ini telah menyediakan penilaian mengenai kemungkinan potensi penerapan UBI di Indonesia secara permanen pasca pandemi Covid-19. Dengan menggunakan tinjauan literatur sistematis, studi ini tampaknya tidak menyediakan dukungan terhadap penerapan UBI secara permanen di luar masa krisis dan transisi pemulihan ekonomi di Indonesia. Hal ini cukup beralasan mengingat penerapan BLT sebagai program yang paling mendekati UBI tidak sepenuhnya menunjukkan manfaat kesejahteraan dalam artian luas, bahkan di masa krisis sekalipun. BLT memang memberikan manfaat yang cukup besar terhadap aspek ekonomi, pendidikan dan ketenagakerjaan, namun justru menimbulkan efek yang lebih kontraproduktif terhadap aspek kesehatan dan pengembangan komunitas.

Arah kebijakan dalam studi ini sejalan dengan studi Hanna & Olken (2018) dan Tohari *et al* (2019). Dalam konteks Indonesia, meskipun UBI dapat meminimalisir tingkat kesalahan penargetan baik baik *inclusion error* (memasukkan rumah tangga yang tidak miskin dalam penargetan) dan *inclusion error* (mengecualikan rumah tangga miskin dalam penargetan), namun manfaat yang diterima kelompok kurang beruntung relatif lebih rendah dibandingkan program bantuan dengan penargetan tertentu (nilai transfer yang diterima kelompok miskin dan kaya identik). Selain itu, perlu dicatat, penerapan UBI di masa krisis dan pemulihan ekonomi tetap harus dilengkapi dengan program bantuan sosial dengan penargetan tertentu.

Referensi

- Adiwena, B. (2020). *The COVID-19 Crisis: A Turning Point for Universal Basic Income?*. <https://www.covid19indonesia.net/commentaries/covid-19-crisis-a-turning-point-for-ubi>. ANU Indonesia Project on COVID-19.
- Al Izzati, R., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2020). *The Behavioral Effects of Unconditional Cash*. SMERU Research Institute.
- Bazzi, S., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2012). Evaluating Indonesia's Unconditional Cash Transfer Program, 2005-6. *International Initiative for Impact Evaluation Report*.
- Beaton, C., & Lonton, L. (2010). Lessons learned from Indonesia's attempts to reform fossilfuel subsidies. *Trade, Investment and Climate Change Series*. Manitoba: International Institute for Sustainable Development.
- Daruich, D., & Fernández, R. (2020). Universal Basic Income: A Dynamic Assessment. *NBER Working Paper*, (w27351).
- Das, K., Wibowo, P., Chui, M., Agarwal, V., & Lath, V. (2019). Automation and the future of work in Indonesia Jobs lost, jobs gained, jobs changed. *McKinsey & Company*.
- Deaton, A. (2020). *Randomization in the tropics revisited: a theme and eleven variations* (No. w27600). National Bureau of Economic Research.
- Gentilini, U., Grosh, M., Rigolini, J., & Yemtsov, R. (Eds.). (2019). *Exploring universal basic income: A guide to navigating concepts, evidence, and practices*. The World Bank.
- Ghatak, M., & Maniquet, F. (2019). Universal basic income: some theoretical aspects. *Annual Review of Economics*, 11, 895-928.
- Gibson, M., Hearty, W., & Craig, P. (2018). Universal basic income: A scoping review of evidence on impacts and study characteristics.
- Hanna, R., & Olken, B. A. (2018). Universal basic incomes versus targeted transfers: Anti-poverty programs in developing countries. *Journal of Economic Perspectives*, 32(4), 201-26.
- Hastuti, H., Usman, S., Sulaksono, B., Mawardi, S., & Syukri, M. (2013). *Pemantauan Cepat Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) 2013*. SMERU Research Institute.
- Hossain, N., Brook, S., Garbarino, S., Notususanto, S., Noor, I. R. & Seda, F. (2012). *Qualitative Assessment: The social impact of cash transfer programmes in Indonesia*. Oxford Policy Management Limited.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *KEMENKEU TANGGAP COVID-19: Informasi Terkini*. <https://kemenkeu.go.id/covid19>. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). Estimating the impact of covid-19 on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175-192.
- Tohari, A., Parsons, C., & Rammohan, A. (2019). Targeting poverty under complementarities: Evidence from Indonesia's unified targeting system. *Journal of Development Economics*, 140, 127-144.
- Triyana, M. (2016). Do health care providers respond to demand-side incentives? evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 8(4), 255-88.
- World Bank. (2012). BLT Temporary Unconditional Cash Transfer. Social Assistance Program And Public Expenditure Review 2. *Indonesia Social Assistance Program and Public Expenditure Reviews*. Jakarta: World Bank.
- World Bank. (2020). *World Development Indicators 2020*. <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>. Washington DC: World Bank.